



Penguatan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Destinasi Wisata Puncak Pagerbatu Kota Banjar

Strengthening Community-Based Tourism Governance through Capacity Building of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) at Puncak Pagerbatu Tourism Destination, Banjar City

Riza Purnama^{1*}, Teguh Anggoro², Tina Cahya Mulyatin³, Dara Siti Nurjanah⁴, Hani Maryam Hermana⁵, Imelda Sinta Dewi⁶

¹⁻⁶ STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizapurnama06@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 20 Juni 2026;

Revisi: 22 Juli 2026;

Diterima: 25 Agustus 2026;

Terbit: 31 Agustus 2026

Keywords: *Capacity Building; Community-Based Tourism; Local Tourism; Pokdarwis; Tourism Governance.*

Abstract. *The management of Puncak Pagerbatu as a local tourism destination in Banjar City faces several challenges, particularly the suboptimal institutional capacity of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), the lack of integration among existing tourism potentials and products, and the need to strengthen community capacity in destination management. This Community Service Program (PKM) aimed to enhance the capacity and understanding of Pokdarwis and local stakeholders in developing community-based tourism governance. The program was implemented through structured discussions and knowledge-sharing sessions, presentations delivered by an academic, a tourism policy analyst, and a village tourism facilitator, as well as participatory discussions involving the village government, Village Consultative Body (BPD), Community Empowerment Institution (LPM), Pokdarwis, security personnel, community leaders, religious leaders, youth representatives, and local residents. The results demonstrated improved participants' understanding of the roles and functions of Pokdarwis, institutional strengthening, the distribution of responsibilities among stakeholders, and the importance of collaborative destination management. The program also identified several priority areas for the development of Puncak Pagerbatu, including the integration of tourism potentials, development of tourism packages, strengthening of the Pokdarwis institution, and improvement of supporting facilities. As a follow-up, the tourism managers agreed to develop and establish official tourism packages and diversify tourism products to improve service quality and enhance the attractiveness of Puncak Pagerbatu. The program therefore provided an initial foundation for strengthening community-based tourism governance through institutional capacity building and stakeholder collaboration.*

Abstrak

Pengelolaan wisata lokal Puncak Pagerbatu Kota Banjar, masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama belum optimalnya kelembagaan Pokdarwis, belum terintegrasinya potensi dan produk wisata, serta perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pokdarwis serta pemangku kepentingan lokal dalam mengembangkan tata kelola wisata berbasis masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi dan sharing, penyampaian materi oleh akademisi, analisis kebijakan bidang pariwisata, dan pendampingan desa wisata, serta diskusi partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, LPM, Pokdarwis, unsur keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai peran Pokdarwis, penguatan kelembagaan, pembagian peran antaraktor, serta pentingnya pengelolaan destinasi secara kolaboratif. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi kebutuhan pengembangan Puncak Pagerbatu, khususnya integrasi potensi wisata, penyusunan paket wisata, penguatan kelembagaan Pokdarwis, dan peningkatan pengelolaan fasilitas pendukung. Sebagai tindak lanjut, pengelola berencana menetapkan paket wisata resmi dan menyusun variasi produk wisata untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik Puncak Pagerbatu. Dengan demikian, kegiatan PKM memberikan dasar bagi penguatan tata kelola

destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat; Peningkatan Kapasitas; Pokdarwis; Tata Kelola Pariwisata; Wisata Lokal.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata lokal merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa (Annamalah et al. 2023; Chan 2023). Pengembangan destinasi wisata tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan potensi alam dan daya tarik wisata, tetapi juga membutuhkan kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola potensi tersebut secara terarah. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pengembangan pariwisata, baik sebagai pengelola, penyedia jasa, maupun penerima manfaat ekonomi dari kegiatan wisata. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan lokal yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan pembagian peran yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan destinasi wisata.

Puncak Pagerbatu di Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, merupakan salah satu potensi wisata lokal yang berkembang melalui keterlibatan masyarakat. Kawasan ini memiliki daya tarik berupa panorama dari ketinggian, udara yang relatif sejuk, serta suasana yang pada pagi hari memberikan pengalaman seperti berada “di atas awan”. Dalam perkembangannya, kawasan tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dan aktivitas wisata, antara lain gardu pandang, spot foto, area camping, wahana ATV, kafe, dan kolam renang. Pengelolaan Puncak Pagerbatu selama ini tumbuh dari inisiatif dan swadaya masyarakat bersama Pokdarwis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Puncak Pagerbatu memiliki modal awal yang cukup untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal.

Meskipun memiliki potensi yang cukup beragam, pengelolaan Puncak Pagerbatu masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu persoalan utama adalah kelembagaan Pokdarwis yang masih berada pada tingkat dusun sehingga koordinasi pengelolaan destinasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kelembagaan di tingkat desa. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan pengelola dalam menyatukan berbagai potensi wisata yang tersedia. Selain itu, potensi yang ada belum sepenuhnya dikemas menjadi paket wisata yang terintegrasi. Padahal, keberadaan berbagai atraksi seperti kuliner, kolam renang, dan wisata ATV dapat dikembangkan menjadi rangkaian pengalaman wisata yang lebih terstruktur dan memberikan pilihan yang lebih jelas bagi pengunjung.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan masih terbatasnya kunjungan wisatawan, akses masuk menuju objek wisata yang relatif kecil, serta ketersediaan penerangan jalan umum (PJU) yang masih minim. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Puncak Pagerbatu tidak cukup dilakukan hanya dengan menambah daya tarik fisik, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas pengelola dan pembenahan tata kelola destinasi. Dalam pengembangan destinasi, aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, promosi, dan evaluasi perlu dipandang sebagai komponen yang saling berkaitan. Pendekatan destination management menekankan pentingnya integrasi berbagai komponen tersebut agar pengelolaan destinasi dapat berjalan secara lebih terpadu.

Penguatan kapasitas Masyarakat (Dolezal and Novelli 2022; Moayerian, McGehee, and Stephenson Jr 2022; Torabi et al. 2023) menjadi penting karena konsep pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan dan memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata. Perspektif Community-Based Tourism (Abreu et al. 2024; Krittayaruangroj, Suriyankietkaew, and Hallinger 2023; Suriyankietkaew et al. 2025; Tuyen et al. 2025) menekankan bahwa pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kehadiran masyarakat sebagai tenaga pendukung, tetapi juga dengan keterlibatan mereka dalam pengelolaan, pemanfaatan manfaat ekonomi, serta pemeliharaan lingkungan dan budaya lokal. Dengan demikian, peningkatan kapasitas Pokdarwis di Puncak Pagerbatu diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran kelembagaan, pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan, pengembangan produk wisata, dan promosi.

Selain kapasitas internal Pokdarwis, pengelolaan destinasi juga membutuhkan hubungan kerja yang jelas antar pemangku kepentingan. collaborative governance (Gash 2022; Ulibarri et al. 2023; Zhou et al. 2025) menekankan proses pengambilan keputusan dan kerja sama yang melibatkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Puncak Pagerbatu, pengembangan wisata tidak dapat hanya mengandalkan Pokdarwis. Pemerintah Desa, BUMDes, masyarakat, kelompok pemuda, pelaku UMKM, pendamping pariwisata, serta unsur pemerintah terkait memiliki peran yang saling melengkapi. Bahan kegiatan PKM juga menempatkan Pemerintah Desa sebagai regulator dan fasilitator, BUMDes sebagai pengelola kegiatan usaha, serta Pokdarwis sebagai penggerak partisipasi masyarakat.

Pemilihan Pokdarwis sebagai subjek utama pengabdian didasarkan pada posisinya yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pengelolaan daya tarik wisata. Pokdarwis pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di wilayahnya. Dalam kegiatan di Puncak

Pagerbatu, penguatan Pokdarwis dipandang penting karena kelompok tersebut dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pengelolaan destinasi. Namun, keberadaan Pokdarwis pada tingkat dusun perlu diperkuat melalui kelembagaan yang lebih terkoordinasi pada tingkat desa. Dokumen kegiatan juga menunjukkan bahwa struktur Pokdarwis idealnya memiliki pembagian fungsi yang jelas, seperti keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan usaha.

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini difokuskan pada sosialisasi dan sharing untuk memberikan pemahaman kepada Pokdarwis tingkat dusun dan para pemangku kepentingan Desa Batulawang mengenai optimalisasi peran Pokdarwis dalam pengelolaan wisata lokal Puncak Pagerbatu. Kegiatan tidak diarahkan semata-mata pada penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan, membangun kesamaan pemahaman, dan menyusun arah pengembangan destinasi secara bersama. Kegiatan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPM, Pokdarwis, unsur keamanan, kepala dusun, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena pengembangan wisata merupakan persoalan bersama yang membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas.

Perubahan yang diharapkan dari kegiatan ini bukan hanya bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga adanya penguatan kelembagaan (Adedoyin, Erum, and Bekun 2022; Purnamawati 2025, 2025; Roik 2025) dan arah pengelolaan wisata yang lebih jelas. Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk mendorong terbentuknya Pokdarwis pada tingkat Desa Batulawang sebagai wadah yang mengintegrasikan Pokdarwis tingkat dusun, memperjelas arah pengelolaan usaha wisata melalui BUMDes, serta mengembangkan paket wisata Puncak Pagerbatu dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang tersedia. Pengelolaan usaha melalui BUMDes diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih jelas bagi pengembangan kegiatan ekonomi wisata dan membuka peluang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, pengembangan paket wisata diharapkan dapat membuat berbagai atraksi yang tersedia tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari produk wisata yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas pengelola wisata (Bardhan and Sarkar 2024; Suryawan, Gunawan, and Lee 2025; Tam 2024; Tokarchuk, Barr, and Cozzio 2022), khususnya Pokdarwis, dalam memahami tata kelola pariwisata berbasis masyarakat serta mendorong terbentuknya kelembagaan pengelola yang

lebih terintegrasi. Pada tahap berikutnya, penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan Puncak Pagerbatu melalui pembagian peran antara Pokdarwis, Pemerintah Desa, dan BUMDes, pengembangan paket wisata, peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta terbukanya peluang peningkatan Pendapatan Asli Desa. Arah tersebut sejalan dengan hasil kegiatan yang menyepakati perlunya penetapan paket wisata resmi dan penyusunan variasi produk wisata Puncak Pagerbatu sebagai tindak lanjut pengembangan destinasi.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Obyek Wisata Puncak Pagerbatu, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada Rabu, 29 Juli 2026, mulai pukul 08.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa STISIP Bina Putera Banjar dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan Desa Batulawang. Peserta kegiatan terdiri atas Pemerintah Desa Batulawang, BPD, LPM, Pokdarwis tingkat dusun, kepala dusun, unsur keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pemuda, dan masyarakat. Pelibatan (Rahayu and Abbas 2024; Widhiasthini et al. 2025) berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar proses penguatan pengelolaan wisata tidak hanya berorientasi pada Pokdarwis, tetapi juga membangun pemahaman bersama mengenai pembagian peran dalam pengembangan Puncak Pagerbatu.

Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah sosialisasi dan sharing yang dipadukan dengan diskusi partisipatif. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pengelola wisata, khususnya Pokdarwis tingkat dusun, mengenai pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat, fungsi kelembagaan Pokdarwis, pengembangan produk wisata, serta pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Sementara itu, kegiatan sharing digunakan sebagai ruang pertukaran pengalaman dan gagasan antara akademisi, pemerintah, pendamping pariwisata, pengelola wisata, dan masyarakat.

Pendekatan partisipatif dipilih karena persoalan Puncak Pagerbatu berkaitan langsung dengan kondisi dan pengalaman masyarakat sebagai pengelola wisata. Melalui diskusi, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menyampaikan kondisi yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi serta memberikan gagasan mengenai kebutuhan pengembangan wisata. Hasil diskusi kemudian digunakan untuk merumuskan arah tindak lanjut pengelolaan Puncak Pagerbatu.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kondisi dan permasalahan, sosialisasi dan penyampaian materi, sharing dan diskusi partisipatif, serta perumusan tindak lanjut.

Tahap pertama, identifikasi kondisi dan permasalahan. Tim mengidentifikasi kondisi pengelolaan Puncak Pagerbatu dan persoalan yang dihadapi pengelola. Identifikasi dilakukan dengan melihat kondisi kelembagaan Pokdarwis, potensi dan produk wisata yang tersedia, serta kebutuhan pengembangan destinasi. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kebutuhan penguatan kelembagaan, integrasi potensi wisata, pengembangan paket wisata, dan peningkatan pengelolaan destinasi.

Tahap kedua, sosialisasi dan penyampaian materi. Materi disampaikan oleh beberapa narasumber dengan perspektif yang berbeda. Akademisi menyampaikan materi mengenai optimalisasi peran Pokdarwis dalam pengelolaan wisata lokal Puncak Pagerbatu. Analis kebijakan bidang pariwisata memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan pariwisata lokal dan arah kebijakan pengembangan destinasi. Pendamping desa wisata memberikan materi mengenai konsep desa wisata, tahapan perkembangan desa wisata, fungsi Pokdarwis, serta praktik pengelolaan wisata lokal. Dalam materi akademik juga diperkenalkan konsep Community-Based Tourism, Collaborative Governance, Sustainable Tourism, Good Governance, dan Destination Management sebagai kerangka pemahaman dalam pengelolaan destinasi.

Tahap ketiga, sharing dan diskusi partisipatif. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, pengalaman, dan pandangan mengenai pengelolaan Puncak Pagerbatu. Diskusi diarahkan pada beberapa persoalan utama, yaitu kelembagaan Pokdarwis yang masih berada pada tingkat dusun, belum terintegrasinya potensi dan produk wisata, kebutuhan penyusunan paket wisata, serta kebutuhan penguatan tata kelola destinasi. Forum ini juga digunakan untuk membahas pembagian peran antara Pokdarwis, Pemerintah Desa, BUMDes, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahap keempat, perumusan tindak lanjut. Hasil sharing dan diskusi kemudian diarahkan pada beberapa langkah pengembangan. Pertama, mendorong terbentuknya Pokdarwis pada tingkat Desa Batulawang sebagai wadah koordinasi yang mengintegrasikan Pokdarwis tingkat dusun. Kedua, mendorong pengelolaan kegiatan usaha wisata melalui BUMDes sehingga pengelolaan usaha dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan memiliki peluang memberikan kontribusi terhadap PADes. Ketiga, menyusun paket wisata dengan

mengintegrasikan berbagai potensi yang tersedia di Puncak Pagerbatu. Keempat, memperkuat koordinasi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengembangan destinasi.



Gambar 1. Diagram Pelaksanaan PKM.

3. HASIL

Dinamika Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Obyek Wisata Puncak Pagerbatu dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan sharing yang dipadukan dengan diskusi partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut pemahaman pengelola mengenai kelembagaan, pembagian peran, pengembangan produk wisata, dan arah pengelolaan destinasi. Kegiatan dilaksanakan dengan mempertemukan berbagai unsur yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan wisata Puncak Pagerbatu, yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPM, Pokdarwis tingkat dusun, BUMDes, kepala dusun, unsur keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pemuda, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi ruang untuk melihat persoalan wisata dari sudut pandang yang berbeda.



Gambar.2 Pembukaan PKM oleh Kepala Desa Batulawang

Proses kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai optimalisasi peran Pokdarwis dalam pengelolaan wisata lokal. Materi ini memberikan pemahaman bahwa Pokdarwis tidak hanya berfungsi sebagai kelompok yang membantu menjaga keberadaan objek wisata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, menjaga daya tarik wisata, mendukung promosi, serta ikut mengembangkan produk wisata. Pemahaman tersebut menjadi penting karena kondisi awal menunjukkan bahwa Pokdarwis di Puncak Pagerbatu masih berkembang pada tingkat dusun sehingga diperlukan koordinasi yang lebih kuat pada tingkat desa.

Sharing berikutnya memberikan perspektif mengenai pengelolaan pariwisata lokal dari sisi kebijakan dan praktik lapangan. Narasumber dari bidang kebijakan pariwisata memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan destinasi secara terarah, sedangkan pendamping desa wisata memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan wisata dan pengembangan desa wisata. Proses sharing tidak hanya berlangsung satu arah. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi dalam mengelola Puncak Pagerbatu. Dengan cara tersebut, materi yang disampaikan dapat dikaitkan langsung dengan kondisi destinasi yang mereka kenal dan kelola sehari-hari.

Teridentifikasinya Persoalan dan Kebutuhan Pengelolaan

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan memperlihatkan bahwa Puncak Pagerbatu sebenarnya telah memiliki sejumlah potensi wisata, seperti panorama alam, gardu pandang, spot foto, camping, ATV, kafe, dan kolam renang. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan sebagai satu kesatuan produk wisata. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi karena keberadaan berbagai atraksi belum otomatis

menghasilkan pengalaman wisata yang terintegrasi bagi pengunjung. Persoalan lain yang muncul adalah kelembagaan Pokdarwis yang masih berada pada tingkat dusun. Kondisi tersebut membuat koordinasi pengelolaan wisata pada tingkat kawasan belum berjalan secara optimal. Selain itu, masih terdapat persoalan berupa terbatasnya kunjungan wisatawan, akses menuju objek wisata yang relatif kecil, serta fasilitas penerangan jalan umum yang masih perlu dikembangkan. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan Puncak Pagerbatu memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola. Dari proses diskusi tersebut mulai terbentuk kesadaran bersama bahwa potensi Puncak Pagerbatu perlu dikelola sebagai satu destinasi, bukan melalui pengelolaan atraksi secara terpisah. Pemahaman ini menjadi salah satu hasil penting kegiatan karena pengembangan destinasi membutuhkan keterhubungan antara atraksi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, promosi, dan pengelolaan. Pendekatan destination management yang menjadi bagian dari materi kegiatan juga menekankan pentingnya integrasi komponen-komponen tersebut dalam pengelolaan destinasi.

Peningkatan Wawasan Pengelola dan Penguatan Peran Pokdarwis

Hasil yang paling langsung terlihat dari kegiatan adalah bertambahnya wawasan pengelola mengenai pengelolaan wisata lokal dan fungsi Pokdarwis. Melalui sosialisasi dan sharing, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep pariwisata berbasis masyarakat, tata kelola destinasi, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pengembangan paket wisata.

Peningkatan wawasan tersebut penting karena pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan sumber daya alam. Masyarakat membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana potensi lokal dikembangkan menjadi produk wisata, bagaimana wisatawan dilayani, bagaimana kegiatan ekonomi wisata dikelola, dan bagaimana manfaat kegiatan wisata dapat kembali kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, Pokdarwis diposisikan sebagai penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan pengelolaan kegiatan usaha diarahkan untuk dilakukan melalui BUMDes. Pembagian peran tersebut menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola yang lebih jelas. Dengan demikian, hasil PKM tidak hanya berupa transfer pengetahuan dari narasumber kepada peserta, tetapi mulai mengarah pada perubahan cara pandang pengelola. Wisata mulai dipahami bukan sekadar tempat yang memiliki daya tarik, melainkan sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan kelembagaan, pengelolaan usaha, pelayanan, promosi, dan keterlibatan masyarakat.

Terbentuknya Pokdarwis Tingkat Desa

Salah satu perubahan kelembagaan yang dihasilkan dari kegiatan adalah terbentuknya Pokdarwis tingkat Desa Batulawang. Pembentukan ini menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan keberadaan Pokdarwis yang sebelumnya berada pada tingkat dusun. Dengan adanya wadah pada tingkat desa, koordinasi pengelolaan wisata diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi dapat diarahkan pada tujuan pengembangan destinasi yang sama. Perubahan tersebut dapat dipandang sebagai munculnya pranata kelembagaan baru dalam pengelolaan wisata Desa Batulawang. Pokdarwis tingkat desa menjadi ruang koordinasi bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak pada lingkup dusun. Dalam jangka panjang, kelembagaan ini diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas, meningkatkan koordinasi, dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam mengembangkan pariwisata.

Pembentukan kelembagaan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk membedakan fungsi Pokdarwis dan pengelola usaha wisata. Dalam materi kegiatan dijelaskan bahwa Pokdarwis berorientasi pada penggerakan partisipasi masyarakat, sedangkan pengelola Desa Wisata atau unit usaha memiliki orientasi pengelolaan usaha. Pembagian tersebut menjadi penting agar aktivitas sosial kemasyarakatan dan aktivitas bisnis wisata dapat dikelola secara lebih jelas.

Penguatan Arah Pengelolaan Wisata melalui BUMDes

Perubahan penting lainnya adalah adanya arah pengelolaan usaha wisata melalui BUMDes. Dalam kegiatan sharing, muncul pemahaman bahwa pengelolaan wisata yang memiliki aktivitas ekonomi perlu dikelola dengan kelembagaan usaha yang lebih jelas. BUMDes diarahkan untuk menangani aspek usaha wisata, sementara Pokdarwis tetap memiliki peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengembangan destinasi.

Arah tersebut membuka peluang agar kegiatan wisata tidak berhenti pada aktivitas pelayanan pengunjung, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi desa. Apabila dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aktivitas usaha wisata dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekaligus membuka peluang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada tahap ini, kontribusi terhadap PADes perlu dipahami sebagai potensi yang hendak dibangun, bukan sebagai hasil penerimaan yang telah terukur dari kegiatan PKM. Dengan demikian, hasil PKM pada aspek ini lebih tepat disebut sebagai perubahan arah kelembagaan dan pengelolaan usaha yang menjadi dasar bagi pengembangan manfaat ekonomi desa ke depan.

Munculnya Gagasan dan Paket Wisata Puncak Pagerbatu

Kegiatan juga menghasilkan arah tindak lanjut berupa pengembangan paket wisata Puncak Pagerbatu. Sebelumnya, berbagai atraksi seperti kuliner, kolam renang, ATV, camping, dan spot foto cenderung dipandang sebagai potensi yang berdiri sendiri. Melalui diskusi, muncul pemahaman bahwa potensi tersebut perlu dikemas menjadi rangkaian produk wisata yang lebih terintegrasi. Pengembangan paket wisata menjadi langkah teknis yang penting karena wisatawan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai keberadaan objek, tetapi juga membutuhkan pilihan aktivitas yang jelas. Oleh karena itu, paket wisata dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan berbagai atraksi, menentukan pilihan aktivitas, mengatur pelayanan, dan mempermudah promosi.

Hasil kegiatan selanjutnya mengarah pada rencana penetapan paket wisata resmi dan penyusunan variasi produk/paket wisata Puncak Pagerbatu. Hal ini menjadi salah satu bentuk aksi program yang konkret karena memberikan arah tindak lanjut yang dapat dikembangkan oleh pengelola setelah kegiatan PKM selesai.

Perubahan Sosial yang Mulai Terlihat

Jika dilihat dari proses dan hasil kegiatan, perubahan yang muncul tidak hanya berada pada aspek pengetahuan, tetapi mulai menyentuh aspek kelembagaan dan pola hubungan antaraktor. Sebelum kegiatan, pengelolaan Pokdarwis masih lebih banyak berlangsung pada tingkat dusun. Setelah dilakukan sosialisasi dan sharing, muncul kebutuhan dan langkah untuk membangun kelembagaan Pokdarwis pada tingkat desa.

Perubahan lainnya terlihat dari munculnya pemahaman mengenai pembagian peran antaraktor. Pemerintah Desa diarahkan sebagai regulator dan fasilitator, Pokdarwis sebagai penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan BUMDes diarahkan pada pengelolaan kegiatan usaha wisata. Pola pembagian tersebut memberikan dasar bagi hubungan kerja yang lebih terarah antara unsur pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan ekonomi desa.

Kesadaran baru juga muncul dalam melihat pengembangan wisata sebagai tanggung jawab bersama. Keterlibatan pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya menunjukkan bahwa pengembangan Puncak Pagerbatu membutuhkan kolaborasi. Dengan demikian, perubahan sosial yang diharapkan bukan hanya bertambahnya jumlah pengelola, tetapi terbentuknya cara pandang bersama bahwa pengembangan wisata merupakan proses kolektif yang membutuhkan kelembagaan, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas.

4. DISKUSI

Hasil pengabdian kepada masyarakat di Puncak Pagerbatu menunjukkan bahwa persoalan pengembangan wisata lokal tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan objek atau fasilitas wisata, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pengelola dan kelembagaan yang mengaturnya. Puncak Pagerbatu telah memiliki beberapa daya tarik, seperti panorama alam, gardu pandang, spot foto, area camping, ATV, kafe, dan kolam renang. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan dan produk wisata. Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami bahwa pengembangan destinasi membutuhkan penguatan aspek kelembagaan sekaligus kemampuan menghubungkan berbagai potensi menjadi pengalaman wisata yang lebih terarah.



Gambar 3. Pemaparan Narsumber Akademisi

Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Perspektif Community-Based Tourism

Sosialisasi dan sharing yang dilakukan dalam kegiatan PKM memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola merupakan kebutuhan awal dalam pengembangan Puncak Pagerbatu. Pokdarwis tingkat dusun selama ini telah terlibat dalam pengelolaan wisata, tetapi belum memiliki wadah kelembagaan yang kuat pada tingkat desa. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman bahwa Pokdarwis tidak hanya berperan dalam menjaga objek wisata, tetapi juga dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat, mendukung pelayanan wisata, menjaga kebersihan dan keamanan, melakukan promosi, serta ikut mengembangkan paket wisata. Pembagian fungsi tersebut juga tercermin dalam materi kegiatan yang menempatkan Pokdarwis sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan gagasan **Community-Based Tourism (CBT)** yang menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Murphy (1985)

menekankan pendekatan pengembangan pariwisata yang memperhatikan inisiatif lokal, manfaat bagi masyarakat, dan kesesuaian produk wisata dengan lingkungan serta masyarakat setempat. Dalam konteks Puncak Pagerbatu, pendekatan tersebut relevan karena perkembangan objek wisata pada awalnya tumbuh dari swadaya masyarakat bersama Pokdarwis.

Peningkatan wawasan melalui sosialisasi tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Pengetahuan baru menjadi penting ketika dapat mendorong masyarakat untuk mengambil peran yang lebih jelas dalam pengelolaan destinasi. Perubahan dari sekadar “menjaga objek wisata” menuju pemahaman mengenai pengelolaan destinasi dan pengembangan produk wisata merupakan salah satu perubahan sosial awal yang ditemukan dalam kegiatan ini.

Dari Pokdarwis Tingkat Dusun menuju Kelembagaan Tingkat Desa

Salah satu temuan penting dari proses pengabdian adalah munculnya kebutuhan untuk mengintegrasikan Pokdarwis yang sebelumnya berada pada tingkat dusun ke dalam kelembagaan pada tingkat desa. Secara teoritis, penguatan kelembagaan diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak berjalan secara sporadis, tetapi memiliki struktur, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas. Dalam kegiatan PKM, pembentukan Pokdarwis tingkat Desa Batulawang menjadi salah satu bentuk perubahan kelembagaan yang penting. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pengelolaan yang bersifat sektoral berdasarkan wilayah dusun menuju upaya membangun koordinasi pada tingkat destinasi. Struktur Pokdarwis sendiri dapat mencakup fungsi keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata, hubungan masyarakat dan pengembangan SDM, serta pengembangan usaha. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu harus diawali dengan pembangunan fisik. Perubahan dapat dimulai dari perubahan cara masyarakat mengorganisasikan dirinya. Ketika kelompok-kelompok yang sebelumnya berjalan pada tingkat dusun mulai diarahkan ke dalam koordinasi tingkat desa, maka terbentuk dasar kelembagaan yang memungkinkan pengelolaan wisata dilakukan secara lebih terintegrasi.

Collaborative Governance sebagai Dasar Pembagian Peran

Pengembangan Puncak Pagerbatu juga menunjukkan pentingnya pendekatan collaborative governance. Ansell dan Gash menjelaskan collaborative governance sebagai proses yang mempertemukan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama untuk membangun keputusan dan tindakan kolektif. Kajian mereka menunjukkan pentingnya dialog

langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, serta kepemimpinan dalam proses kolaboratif.

Temuan kegiatan PKM menunjukkan adanya ruang dialog antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, masyarakat, BUMDes, tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur lainnya. Forum tersebut tidak hanya digunakan untuk menyampaikan materi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi pengelolaan Puncak Pagerbatu. Dalam kegiatan tersebut, masukan masyarakat disepakati untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi dan sharing dapat menjadi ruang awal pembentukan *collaborative governance*. Kolaborasi belum dapat dikatakan telah mencapai tahap yang matang karena masih diperlukan mekanisme kerja, pembagian kewenangan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Namun, adanya dialog dan kesepakatan bersama menunjukkan mulai terbentuknya *shared understanding* mengenai persoalan dan arah pengembangan wisata.

Perubahan yang terjadi bukan hanya pada tingkat individu pengelola, tetapi juga mulai menyentuh hubungan antaraktor. Pemerintah Desa tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata. Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, dan pihak lainnya mulai dipahami sebagai aktor yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berhubungan.



Gambar 4. Peserta PKM Sosialisasi dan Sharing Wisata Lokal Puncak Pagerbatu BUMDes dan Potensi Pengembangan Ekonomi Desa

Salah satu arah perubahan yang cukup penting adalah adanya pemahaman mengenai pemisahan fungsi sosial Pokdarwis dan fungsi usaha BUMDes. Dalam materi kegiatan dijelaskan bahwa Pokdarwis merupakan kelompok swadaya masyarakat yang tidak berorientasi bisnis, sedangkan pengelola desa wisata memiliki orientasi usaha dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Temuan tersebut memiliki implikasi penting bagi pengelolaan Puncak Pagerbatu. Jika Pokdarwis dibebani sekaligus dengan fungsi sosial dan fungsi bisnis, terdapat risiko ketidakjelasan peran dalam pengelolaan usaha. Sebaliknya,

apabila Pokdarwis diarahkan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan BUMDes menangani aktivitas usaha, maka terdapat peluang untuk membangun pembagian fungsi yang lebih jelas. Dalam model yang dibahas pada kegiatan, BUMDes diarahkan untuk mengelola unit usaha, SOP, keuangan dan aset, pemasaran, serta kontribusi keuntungan kepada PADes, sementara Pokdarwis berperan menggerakkan partisipasi masyarakat, pelayanan informasi, kebersihan, keamanan, penyusunan paket wisata, dan promosi.



Gambar.5 Sharing Bersama Pendamping Desa Wisata

Secara teoritis, pembagian tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa tidak harus dijalankan oleh satu lembaga. Keduanya dapat berjalan secara beriringan melalui pembagian fungsi. Pokdarwis memperkuat dimensi sosial-partisipatif, sedangkan BUMDes memperkuat dimensi ekonomi-usaha. Dalam konteks Puncak Pagerbatu, model tersebut membuka peluang agar kegiatan wisata memberikan manfaat ekonomi yang lebih terstruktur bagi desa dan masyarakat.

Namun, kontribusi terhadap PADes dalam artikel ini perlu ditempatkan sebagai potensi dan arah pengembangan, bukan sebagai dampak ekonomi yang sudah terbukti. Kegiatan PKM belum melakukan pengukuran pendapatan atau kontribusi PADes setelah perubahan kelembagaan tersebut.



Gambar 6. Para Narasumber.

Integrasi Potensi menjadi Paket Wisata

Temuan lain yang penting adalah munculnya kebutuhan untuk mengembangkan paket wisata Puncak Pagerbatu. Berbagai atraksi yang telah tersedia belum sepenuhnya dipasarkan sebagai produk yang terintegrasi. Padahal, pengembangan produk wisata merupakan bagian penting dalam pengelolaan destinasi. Pendekatan *destination management* menempatkan pengembangan produk, pengelolaan, pemasaran, dan koordinasi sebagai bagian penting dalam meningkatkan daya saing destinasi. UN Tourism juga menempatkan *destination management*, *product development*, serta *marketing and branding* sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing destinasi. Dalam konteks Puncak Pagerbatu, gagasan tersebut diterjemahkan melalui upaya menghubungkan beberapa potensi, antara lain kuliner/kafe, kolam renang, dan wisata ATV dalam konsep “3 Sub Destinasi–1 Tujuan”. Konsep tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang dari pengelolaan atraksi secara terpisah menuju pengelolaan sebagai satu kesatuan destinasi.

Hasil diskusi kemudian menghasilkan rencana untuk menetapkan paket wisata resmi dan menyusun variasi produk serta paket wisata agar wisatawan lebih mudah memilih aktivitas yang tersedia. Secara teoritis, langkah ini merupakan bentuk sederhana dari *product integration*, yaitu menghubungkan berbagai atraksi menjadi produk yang memiliki nilai dan pengalaman yang lebih jelas bagi wisatawan.

Sosialisasi sebagai Titik Awal Perubahan Sosial

Jika dilihat dari keseluruhan proses, kegiatan PKM menunjukkan bahwa sosialisasi dan sharing dapat menjadi titik awal perubahan sosial ketika diikuti dengan kesepakatan dan tindakan kelembagaan. Perubahan tidak berhenti pada bertambahnya informasi yang diterima peserta, tetapi mulai terlihat melalui tiga arah perubahan: penguatan wawasan pengelola, penguatan kelembagaan Pokdarwis pada tingkat desa, dan perubahan arah pengelolaan usaha melalui BUMDes. Proses tersebut juga memperlihatkan hubungan antara kapasitas, kelembagaan, dan kolaborasi. Peningkatan wawasan memberikan dasar bagi perubahan cara pandang; perubahan cara pandang mendorong kebutuhan akan kelembagaan yang lebih kuat; dan kelembagaan yang lebih jelas memberikan dasar bagi pembagian peran antaraktor. Pada tahap berikutnya, pembagian peran tersebut dapat mendukung pengembangan paket wisata dan pengelolaan usaha secara lebih terarah.

Dalam perspektif *collaborative governance*, proses ini dapat dipahami sebagai tahap awal pembentukan *shared understanding*. Ansell dan Gash menempatkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama sebagai unsur penting dalam proses kolaboratif. Sementara itu, dari perspektif CBT, keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan dan manfaat ekonomi menjadi bagian penting agar pariwisata tidak berkembang terpisah dari kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, hasil pengabdian di Puncak Pagerbatu menunjukkan bahwa penguatan tata kelola wisata perlu dimulai dari penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan sebelum diarahkan pada pengembangan usaha yang lebih luas. Terbentuknya Pokdarwis tingkat desa, pembagian fungsi dengan BUMDes, dan munculnya paket wisata merupakan perubahan awal yang saling berkaitan. Perubahan tersebut belum menunjukkan transformasi destinasi secara menyeluruh, tetapi telah membangun dasar sosial dan kelembagaan untuk menuju pengelolaan wisata Puncak Pagerbatu yang lebih terintegrasi.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Obyek Wisata Puncak Pagerbatu, Desa Batulawang, Kota Banjar, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengelola merupakan bagian penting dalam mendorong pengelolaan wisata lokal yang lebih terarah. Melalui kegiatan sosialisasi, sharing, dan diskusi partisipatif, pengelola dan pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran Pokdarwis, pengelolaan destinasi, pengembangan produk wisata, serta pentingnya kolaborasi dalam pengembangan Puncak Pagerbatu.

Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa perubahan awal pada aspek kelembagaan dan pengelolaan. Pokdarwis yang sebelumnya berkembang pada tingkat dusun diarahkan dan terbentuk dalam kelembagaan tingkat desa untuk memperkuat koordinasi. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai pembagian peran antara Pokdarwis, Pemerintah Desa, dan BUMDes, dengan Pokdarwis berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sedangkan BUMDes diarahkan untuk menangani aspek usaha wisata. Pola tersebut memberikan peluang bagi kegiatan wisata untuk berkembang sebagai aktivitas ekonomi desa dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pada aspek produk wisata, kegiatan menghasilkan arah tindak lanjut berupa penyusunan dan penetapan paket wisata Puncak Pagerbatu dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang tersedia. Dengan demikian, hasil PKM tidak hanya berupa peningkatan wawasan peserta, tetapi juga mulai menghasilkan penguatan kelembagaan, pembagian peran yang lebih jelas, dan arah pengembangan produk wisata. Meskipun demikian, perubahan tersebut masih merupakan tahap awal dan membutuhkan tindak lanjut melalui penguatan kapasitas secara berkelanjutan, penyempurnaan paket wisata, peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan, promosi, serta evaluasi terhadap manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abreu, Leonilo Alves de, Marinês da Conceição Walkowski, André Riani Costa Perinotto, and Júlia Fragoso da Fonseca. 2024. "Community-Based Tourism and Best Practices with the Sustainable Development Goals." *Administrative Sciences* 14(2):36.
- Adedoyin, Festus Fatai, Naila Erum, and Festus Victor Bekun. 2022. "How Does Institutional Quality Moderates the Impact of Tourism on Economic Growth? Startling Evidence from High Earners and Tourism-Dependent Economies." *Tourism Economics* 28(5):1311–32.
- Annamalah, Sanmugam, Pradeep Paraman, Selim Ahmed, Rajinder Dass, Ilham Sentosa, Thillai Raja Pertheban, Farid Shamsudin, Baharudin Kadir, Kalisri Logeswaran Aravindan, and Murali Raman. 2023. "The Role of Open Innovation and a Normalizing Mechanism of Social Capital in the Tourism Industry." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9(2):100056.
- Bardhan, S., and S. Sarkar. 2024. "Optimizing Tourist Flows through Operative Carrying Capacity Assessment: The Case of Bakkhali Coastal Tourism, WB, India. Sustainable Social Development. 2024; 2 (3): 2550." *Development* 2(3):2550.
- Chan, Jennifer Kim Lian. 2023. "Sustainable Rural Tourism Practices from the Local Tourism Stakeholders' Perspectives." *Global Business & Finance Review (GBFR)* 28(3):136–49.
- Dolezal, Claudia, and Marina Novelli. 2022. "Power in Community-Based Tourism: Empowerment and Partnership in Bali." *Journal of Sustainable Tourism* 30(10):2352–70.
- Gash, Alison. 2022. "Collaborative Governance." Pp. 497–509 in *Handbook on theories of governance*. Edward Elgar Publishing.
- Krittayaruangroj, Krittawit, Suparak Suriyankietkaew, and Philip Hallinger. 2023. "Research on Sustainability in Community-Based Tourism: A Bibliometric Review and Future Directions." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 28(9):1031–51.
- Moayerian, Neda, Nancy G. McGehee, and Max O. Stephenson Jr. 2022. "Community Cultural Development: Exploring the Connections between Collective Art Making, Capacity Building and Sustainable Community-Based Tourism." *Annals of Tourism Research* 93:103355.
- Purnamawati, I. Gusti Ayu. 2025. "Strengthening Institutional Policies as a Recovery Strategy for Bali Cultural Tourism and Sustainable Development." *Global Review of Tourism and Social Sciences* 2(1):1–12.
- Rahayu, Sri Walny, and Syahrizal Abbas. 2024. "A Synergy of Halal Tourism Regulations and Tourism Rights Protection in Aceh: Pentahelix Model." *Samarah* 8:1454–75.
- Roik, Oksana. 2025. "Institutional Determinants of Resource Provision for Ukraine's Tourism Sector within the Framework of Public-Private Partnerships." *Економіка Розвитку Сучасн* 7(2):103–9.
- Suriyankietkaew, Suparak, Krittawit Krittayaruangroj, Sukanda Thinthan, and Syamol Lumlongrut. 2025. "Creative Tourism as a Driver for Sustainable Development: A Model for Advancing SDGs through Community-Based Tourism and Environmental Stewardship." *Environmental and Sustainability Indicators* 100828.

- Suryawan, I. Wayan Koko, Vania Dian Gunawan, and Chun-Hung Lee. 2025. "The Role of Local Adaptive Capacity in Marine Ecotourism Scenarios." *Tourism Management* 107:105039.
- Tam, Phan Thanh. 2024. "Key Factors Affecting Enterprise Competitiveness and Business Efficiency: A Case Study of Tourism Enterprises in Vietnam." *Cogent Business & Management* 11(1):2420760.
- Tokarchuk, Oksana, Jacob Charles Barr, and Claudia Cozzio. 2022. "How Much Is Too Much? Estimating Tourism Carrying Capacity in Urban Context Using Sentiment Analysis." *Tourism Management* 91:104522.
- Torabi, Zabih-Allah, Mohammad Reza Rezvani, C. Michael Hall, and Zaheer Allam. 2023. "On the Post-Pandemic Travel Boom: How Capacity Building and Smart Tourism Technologies in Rural Areas Can Help-Evidence from Iran." *Technological Forecasting and Social Change* 193:122633.
- Tuyen, Quang Dai, Cao-Nguyen Phan, Nguyen Duc Hieu, and Trinh Le Anh. 2025. "How Has Community-based Tourism Evolved over Three Decades (1995–2025): A Bibliometric and Systematic Literature Review on Evolution and Future Research Directions." *Sustainable Development* 33(6):8870–93.
- Ulibarri, Nicola, Mark T. Imperial, Saba Siddiki, and Hayley Henderson. 2023. "Drivers and Dynamics of Collaborative Governance in Environmental Management." *Environmental Management* 71(3):495–504.
- Widhiasthini, Ni Wayan, Ni Kadek Winda Yanti, Nyoman Sri Subawa, Elif Baykal, I. Nyoman Budiana, Made Srinitha Millinia Utami, and I. Nyoman Subanda. 2025. "Pentahelix Model and Tri Hita Karana for Bali Sustainable Tourism." *Tourism and Hospitality Research* 14673584251340046.
- Zhou, Cheng, Clare Richardson-Barlow, Linyan Fan, Helen Cai, Wanhao Zhang, and Zhenhua Zhang. 2025. "Towards Organic Collaborative Governance for a More Sustainable Environment: Evolutionary Game Analysis within the Policy Implementation of China's Net-Zero Emissions Goals." *Journal of Environmental Management* 373:123765.